

Judul : Kemenag Usulkan Ongkos Haji Rp 105 juta; Jemaah Harap-harap Cemas
Tanggal : Minggu, 19 November 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Kemenag Usulkan Ongkos Haji Rp 105 Juta Jemaah Harap-harap Cemas

Senayan mengingatkan potensi penarikan tabungan jemaah haji jika biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini jauh lebih mahal dibanding tahun sebelumnya. Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M sebesar Rp 105 juta.

JUMLAH itu naik sangat besar dibanding BPIH 1444 H/2023 M senilai Rp 90 juta. DPR meminta BPIH tahun depan hendaknya mengacu pada komponen BPIH tahun 2023. Dalam arti, BPIH yang ditetapkan untuk tahun 2024 tetap sama dengan tahun 2023.

"Ketika ongkos haji naik, mereka akan banyak menarik uang setoran awal haji di Kemenag," kata anggota Komisi VIII DPR Anisah Syakur di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Sebagaimana diketahui, calon jemaah haji reguler diwajibkan terlebih dahulu membuka tabungan haji sebagai persiapan beribadah ke Tanah Suci. Pembuatan rekening tabungan haji ini dapat dilakukan di bank yang sudah ditunjuk Pemerintah sebagai Bank Penerima Setoran

(BPS) BPIH, dengan setoran awal minimal Rp 25 juta.

Anisah menuturkan, biaya haji yang terlalu tinggi dan antrean yang begitu lama membuat banyak jemaah menarik uang setoran haji awal yang dititipkan ke Kemenag sebesar Rp 25 juta. Kebanyakan para jemaah haji menarik setoran awal haji tersebut untuk digunakan sebagai biaya umrah.

"Ini banyak sekali terjadi di daerah. Di (kabupaten) Pasuruan saja ada sampai 300-400 jemaah haji (tahun lalu) yang menarik uangnya gara-gara melihat ongkos haji naik," ungkap Anisah.

Anggota Fraksi PKB ini khawatir, penarikan massal tabungan haji para jemaah haji akan kembali terjadi apabila BPIH kembali dinaikkan tahun

depan.

"Karena bagi mereka, (BPIH yang ditetapkan) masih terasa berat," ujarnya.

Menurut Anisah, pengenaan BPIH sama seperti tahun sebelumnya bisa dikenakan asal Pemerintah mau melakukan kebijakan efisiensi, salah satunya di biaya perjalanan haji untuk tiket penerbangan. Tingginya biaya tiket pesawat lantaran jemaah harus ikut menanggung beban yang dikeluarkan maskapai setelah mengantarkan para jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi.

Sebab, pesawat yang ditumpangi saat balik biasanya kosong. Untuk itu, dia usul agar Pemerintah bisa memfasilitasi kerja sama dengan maskapai internasional lain untuk mengurangi beban haji akibat tingginya tiket pesawat ini.

"Ini harapan kami, agar jemaah haji ini berlanjut dan tidak banyak yang menarik uangnya di bank," harapnya.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi VIII DPR John Kenedi Azis. John mengatakan, saat ini ribuan calon jemaah haji

Indonesia harap-harap cemas dengan kebijakan Pemerintah dalam menetapkan besaran BPIH ini. Sebab, besaran BPIH ini akan sangat menentukan apakah mereka bisa berangkat haji atau tidak tahun depan.

John menuturkan, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah mengusulkan besaran BPIH ke DPR sebesar Rp 105 juta lebih.

Jumlah ini naik signifikan sebesar Rp 15 juta jika dibandingkan periode pemberangkatan haji sebelumnya.

Jika usulan BPIH ini tidak berubah, maka Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus ditanggung calon jemaah haji sekitar Rp 65 jutaan.

"Kalau seumpamanya kita mengikuti alur pemikiran yang diajukan Pemerintah, maka per calon jemaah haji itu akan menambah sebesar Rp 44 juta lebih, setelah ditambah setoran awal, virtual account dan lainnya," bebernya.

Anggota Fraksi Golkar ini meminta Pemerintah tidak

buru-buru menetapkan besaran BPIH agar DPR melalui Panitia Kerja (Panja) BPIH diperhatikan menurunkan besaran BPIH dari usulan sekarang sesuai dengan kesanggupan Pemerintah.

Apalagi, acuan usulan BPIH saat ini mengacu pada nilai tukar mata uang asing per 1 dolar Amerika sebesar Rp 15.170, sementara nilai tukar rupiah terhadap kurs Riyal Arab Saudi Rp 14.150. "Jadi, jangan terlalu kesusu juga tentang mematok BPIH ini," tegasnya.

Dijelaskan John, salah satu alasan Pemerintah menaikkan BPIH karena tingginya ongkos penerbangan saat ini. Biaya penerbangan mengalami kenaikan akibat naiknya harga avtur dunia, sehingga Pemerintah dalam BPIH menaikkan tarif tiket pesawat sebesar Rp 4 juta dari sebelumnya.

"Saya ingat ketika kita juga bicara BPIH tahun 2023, Kemenag juga mengajukan kenaikan terhadap ongkos pesawat sebagaimana disampaikan Kemenag, sebesar 10,05 persen. Alasannya juga avtur, tuturnya. ■ KAL